

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengganti Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin pemerintahan setiap lima tahun sekali melalui Pemilihan Umum. Setiap pergantian presiden dan wakil presiden, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada kebijakan baru selama periodenya berlangsung. Salah satunya adalah Kebijakan Efisiensi Anggaran. Kebijakan Efisiensi Anggaran ini diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2025 sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dikutip berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Kebijakan Efisiensi Anggaran adalah sebagai upaya pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan dana negara dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti terlambatnya pertumbuhan ekonomi global, peningkatan utang, serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Tidak hanya itu, Kebijakan Efisiensi Anggaran juga bertujuan agar seluruh rupiah yang dikeluarkan bisa bermanfaat untuk khalayak luas sebesar-besarnya (*Inpres No.1, 2025*).

Kehadiran dari Kebijakan Efisiensi Anggaran ini, tentunya kerap kali menuai pro dan kontra bagi beberapa orang atau lembaga yang terdampak akibat dari adanya kebijakan ini (Zaluchu, 2025). Salah satunya ialah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI). Dari adanya Kebijakan Efisiensi Anggaran ini, LPP RRI sempat melakukan

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal kepada para karyawan lepasnya, seperti petugas kebersihan, petugas keamanan, hingga kontributor seperti, penyiar, produser, serta beberapa *music director* pada stasiun yang berada di daerah (Anggela, 2025). Namun, akhirnya dibatalkan setelah Komisi VII DPR RI mendesak untuk membatalkan pemecatan karyawan tersebut (Saputra et al., 2025)

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa LPP RRI merupakan salah satu lembaga penyiaran yang termasuk badan hukum yang dibentuk oleh negara, bersifat mandiri, tidak memihak, non-komersial, dan bertujuan untuk memberikan pelayanan demi kepentingan publik dengan stasiun penyiaran pusat yang berlokasi di ibukota Negara Republik Indonesia. Selain siaran nasional, LPP RRI juga memiliki program siaran lokal di berbagai daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat setempat (*UU No. 32, 2002*). Hal ini memungkinkan RRI menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri, termasuk daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) (*PPID LPP RRI, n.d.*).

Sebagai salah satu lembaga yang dimiliki secara penuh oleh negara, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) tentunya mendapatkan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tingkat nasional serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tingkat regional atau daerah (*UU No. 32, 2002*). Maka dari itu, LPP RRI juga bisa dikatakan sebagai kaki

tangan dari pemerintahan dalam menjalankan perintah baik dari Presiden maupun Wakil Presiden. Berdasarkan dengan salah satu misinya, yakni “*memberikan dukungan pada Presiden dan Wakil Presiden*”, LPP RRI seharusnya dapat mendukung segala kebijakan pemerintah yang telah dibentuk oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan cara penyampaian yang informatif, edukatif, *entertaining*, serta tetap memiliki kontrol sosial di dalamnya.

Media massa berfungsi sebagai sumber informasi, yang bertindak sebagai penyedia dan penyebar informasi tentang berbagai peristiwa, kejadian, kenyataan, dan berbagai hal lainnya yang terjadi di masyarakat (McQuail, 2010). Media massa di Indonesia, termasuk media *online*, berperan strategis untuk mengedukasi masyarakat terutama mengenai berbagai kebijakan publik (KPPN, 2024). Salah satu bentuk media massa yang kini semakin berkembang adalah media *online*, termasuk di antaranya adalah RRI.co.id, yang merupakan portal berita milik LPP RRI. Media *online* seperti RRI.co.id ini menjadi salah satu media arus utama (*mainstream*) yang menyediakan informasi terkini mengenai kebijakan dan program pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan anggaran negara. Seiring dengan meningkatnya konsumsi informasi secara daring, media *online* menjadi *platform* yang efektif dalam menyampaikan berita dan analisis mengenai isu-isu penting, termasuk topik Kebijakan Efisiensi Anggaran. Pemberitaan mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran di media *online* sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi masyarakat.



Gambar 1 Konten 1
Sumber: RRI.co.id

“Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Jawa Timur Dudung Rudi Hendratna menyatakan arahan efisiensi anggaran lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 akan mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk di Jawa Timur.”

(<https://rri.co.id/daerah/1312462/efisiensi-anggaran-diyakini-dorong-pertumbuhan-ekonomi>)



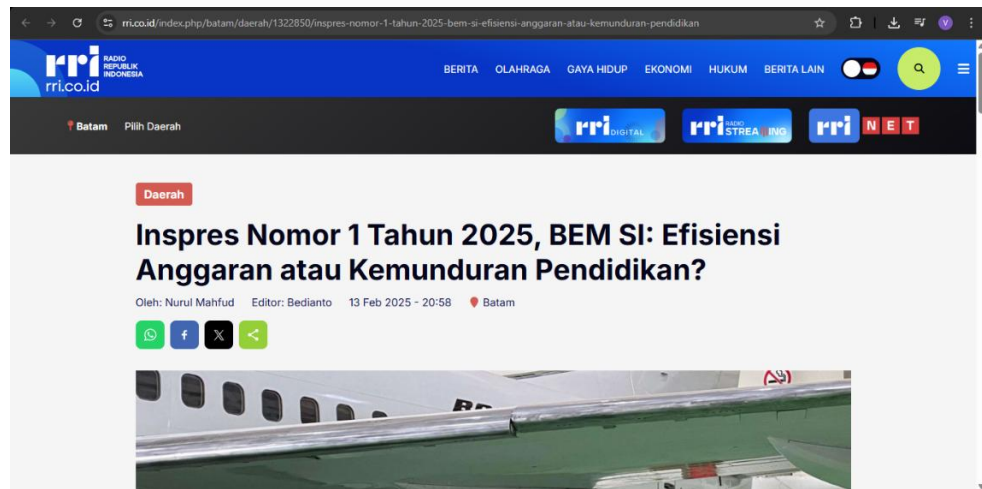
Gambar 2 Konten 2
Sumber: RRI.co.id

“Kita yakin, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tentu sudah melalui pertimbangan yang matang, dan ada skala prioritas bagi masyarakat.”

(<https://rri.co.id/daerah/1340330/efisiensi-anggaran-tak-pengaruhi-belanja-pegawai-pemkab-bangka>)

Konten 1 dan 2 di atas merupakan contoh dari isi artikel yang disajikan oleh RRI.co.id mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran. Kedua artikel di atas merupakan artikel yang bisa dikatakan sudah sesuai atau sejalan dengan salah satu misi LPP RRI yang berbunyi “*memberikan dukungan pada Presiden dan Wakil Presiden*”. Kebijakan Efisiensi Anggaran pada kedua artikel tersebut dikemas dengan cara yang positif oleh RRI.co.id, yang kemudian disajikan kepada masyarakat sebagai para pembacanya. Hal ini juga sesuai dengan salah satu fungsi dari LPP RRI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Pasal 3 ayat (1), yaitu sebagai media informasi yang edukatif, dalam hal ini mengedukasi mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran. Dengan kata lain, RRI.co.id telah menyajikan pemberitaan mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran sebagai hal yang positif kepada masyarakat.

Namun, selain fungsi di atas, LPP RRI juga memiliki fungsi lain. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Pasal 3 ayat (2) menetapkan bahwa RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat. Guna melayani kepentingan masyarakat, LPP RRI juga perlu melibatkan partisipasi publik yang memerlukan keterlibatan masyarakat seperti di dalam konten-kontennya. Hal ini juga diperkuat dengan sifat LPP RRI yang independen, netral, dan non-komersial. Sehingga, keberpihakan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik terhadap masyarakat juga turut dilakukan dalam penyajian konten-kontennya.



Gambar 3 Konten 3
Sumber: RRI.co.id

“Salah satu dampak yang paling dikhawatirkan adalah potensi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Efisiensi anggaran dapat menyebabkan berkurangnya subsidi pemerintah untuk pendidikan tinggi, yang pada akhirnya membebani mahasiswa dengan biaya kuliah yang lebih tinggi. Selain itu, efisiensi anggaran juga berisiko memengaruhi program beasiswa yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pemotongan anggaran dapat menyebabkan pengurangan jumlah penerima beasiswa atau besaran dana yang diterima, yang berdampak pada akses pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.”

<https://rri.co.id/index.php/batam/daerah/1322850/inspres-nomor-1-tahun-2025-bem-si-efisiensi-anggaran-atau-kemunduran-pendidikan>



Gambar 4 Konten 4
Sumber: RRI.co.id

“Disisi lain efisiensi anggaran tetapi jangan sampai mengorbankan kesejahteraan rakyat dengan mengabaikan bidang-bidang yang penting bagi rakyat seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi. Anggaran yang berdampak langsung ke masyarakat ini harusnya menjadi prioritas. Jadi prinsipnya bahwa kebijakan pengurangan/efisiensi anggaran ini harus berhati-hati, dampak bagi masyarakat ini harus dipertimbangkan.”

(<https://rri.co.id/ipitek/1333249/akademisi-unsoed-mau-dibawa-kemana-kebijakan-efisiensi-anggaran-ini>)

Kedua konten tersebut secara singkat berisikan informasi yang seolah-olah memprovokasikan penolakan terkait adanya Kebijakan Efisiensi Anggaran sebagai bentuk keberpihakan LPP RRI terhadap masyarakat. Yang di mana, hal ini tentunya bertentangan atau tidak sejalan dengan misi LPP RRI yang berbunyi *“memberikan dukungan pada Presiden dan Wakil Presiden”*. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dikarenakan LPP RRI yang merupakan lembaga yang menaungi portal berita *online* RRI.co.id ini dimiliki sepenuhnya oleh negara, seharusnya mereka dapat mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden, termasuk Kebijakan Efisiensi Anggaran melalui penyampaian yang bersifat informatif, mendidik, menghibur, dan tetap mengandung fungsi kontrol sosial. Meskipun begitu, di lain sisi LPP RRI juga harus tetap menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat dan menunjukkan keberpihakannya terhadap masyarakat.

Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya *conflict of interest* yang terjadi pada LPP RRI. Dari adanya Kebijakan Efisiensi Anggaran ini, LPP RRI melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal kepada karyawan lepas LPP RRI. Setelah isu ini *viral*, LPP RRI pada akhirnya

membatalkan pemecatan karyawan lepasnya atas desakan Komisi VII DPR RI. Dari sinilah, LPP RRI pun mulai berbicara berdasarkan atas kepentingannya sendiri seolah-olah sebagai bentuk klarifikasi atau perlawanannya atas isu internal yang terjadi dengan menyajikan berita melalui media *online* yang dimilikinya, yaitu RRI.co.id.



Gambar 5 Konten 5
Sumber: RRI.co.id

“Dampak kebijakan tenaga honorer yang dirumahkan ini sudah diterapkan oleh berbagai daerah misalnya di Sumatera Barat. Selain itu, tenaga honorer masa kerja kurang dari 2 tahun di Jembrana, Bali juga mengalami nasib yang sama dirumahkan.”

(<https://www.rri.co.id/nasional/1318952/dirut-rri-tidak-lakukan-phk-non-asn-terkait-efisiensi>)



Gambar 6 Konten 6
Sumber: RRI.co.id

“Direktur Utama (Dirut) RRI I Hendrasmo menegaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pegawai RRI non ASN di lingkungannya. Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR membahas program kerja dan anggaran 2025.”

(<https://www.rri.co.id/nasional/1318952/dirut-rri-tidak-lakukan-phk-non-asn-terkait-efisiensi>)

Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana pembingkai yang dilakukan oleh media *online* RRI.co.id terkait pemberitaan Kebijakan Efisiensi Anggaran. Menurut Erving Goffman, *framing* didefinisikan sebagai skema interpretasi yang memberikan kemungkinan bagi seseorang menyusun, melihat, mengenali, serta memberikan label pada berbagai peristiwa atau pengalaman hidup (Santi, 2012). *Framing* dalam pemberitaan merujuk pada cara media memilih dan menyajikan informasi dengan cara tertentu untuk membentuk persepsi publik mengenai suatu isu. Analisis *framing* pemberitaan mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran pada RRI.co.id sangat relevan untuk mengetahui bagaimana media ini membingkai informasi yang terkait dengan kebijakan pemerintah dalam mengelola anggaran negara,

terutama lembaga publik seperti LPP RRI yang merupakan kaki tangan dari pemerintahan sebagai salah satu lembaga penyiaran milik negara, tetapi juga bersifat independen dan netral.

1.2. Perumusan Masalah

Media *online* RRI.co.id yang dinaungi oleh Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia (LPP RRI), sebagai perpanjangan tangan pemerintah, seharusnya dengan melalui penyajian yang informatif, mendidik, dan menghibur, mereka turut berperan aktif dalam menyuarakan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial demi menjaga keseimbangan informasi di tengah masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan salah satu misi dari LPP RRI yang berbunyi “*memberikan dukungan pada Presiden dan Wakil Presiden*”. Di samping itu, LPP RRI sebagai lembaga yang menaungi RRI.co.id juga harus tetap menjalankan fungsi pelayanannya kepada masyarakat sebagai media informasi yang bersifat independen, netral, dan non-komersial. Maka dari itu, LPP RRI juga perlu memperlihatkan keberpihakannya terhadap masyarakat dalam penyajian pemberitaan mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran pada media *online* RRI.co.id.

Namun, faktanya konten yang dirilis oleh media *online* RRI.co.id saat ini bisa dibilang masih cukup dominan memberitakan mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran sebagai salah satu upaya pemerintah yang positif. Meskipun, hal ini tentu selaras dengan salah satu misi LPP RRI dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden, namun LPP RRI juga harus tetap

menjalankan fungsi pelayanannya kepada masyarakat. Beberapa konten berupa artikel dari media *online* RRI.co.id yang disajikan seolah-olah sebagai bentuk penolakan dari kebijakan yang diciptakan, yakni Kebijakan Efisiensi Anggaran, masih tergolong sangat sedikit dari segi jumlah. Hal ini bisa dikarenakan oleh RRI.co.id sebagai media milik negara juga mungkin memiliki posisi redaksional yang tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh kepentingan pemerintah.

Pemberitaan mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran di media *online* RRI.co.id menjadi topik yang relevan dan perlu dianalisis untuk memahami bagaimana isu tersebut disampaikan kepada publik. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pembingkai berita yang dilakukan oleh media *online* RRI.co.id dalam menyampaikan informasi mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman mendalam dengan memberikan gambaran dari media *online* RRI.co.id dalam membingkai pemberitaan mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah suatu dampak ketercapaian tujuan penelitian yang dilakukan. Kegunaan penelitian mencakup kegunaan ilmiah atau kegunaan teoritis untuk pengembangan ilmu; kegunaan praktis, yakni pemecahan masalah bagi objek penelitian; serta kegunaan sosial guna membantu memecahkan masalah bagi masyarakat luas.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori komunikasi, khususnya dalam kajian Komunikasi Massa, *The Second Level of Agenda Setting Theory*. Melalui penelitian ini, akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana media *online*, dalam hal ini RRI.co.id, menyusun dan membingkai pemberitaan mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu media dalam meningkatkan kualitas pemberitaan. Selain itu, melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para jurnalis terutama tim redaksi media *online* RRI.co.id dalam menyajikan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan negara, seperti Kebijakan Efisiensi Anggaran.

1.4.3. Kegunaan Sosial

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi informasi dari media *online*. Masyarakat diharapkan bisa lebih berpikir secara kritis dalam mengonsumsi pemberitaan mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama terkait dengan isu-isu penting seperti Kebijakan Efisiensi Anggaran.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian ini berupa paradigma konstruktivisme dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial kualitatif. Paradigma konstruktivisme berfokus pada pemahaman mendalam tentang bagaimana individu memandang dan memahami lingkungan mereka, serta bagaimana interaksi sosial memengaruhi persepsi mereka terhadap fenomena yang sedang diteliti. Penelitian yang menggunakan paradigma ini bertujuan mengidentifikasi serta mengevaluasi faktor yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi. Pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan konstruktivisme diperoleh dengan cara mengamati langsung peristiwa yang terjadi di lapangan (Creswell & Poth, 2017).

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme untuk memahami bagaimana media membentuk dan mengonstruksi realitas melalui pemberitaan yang RRI.co.id sajikan. Paradigma ini berfokus pada bagaimana individu atau kelompok, dalam hal ini RRI.co.id, membentuk makna atau interpretasi mereka terhadap suatu peristiwa atau isu, serta bagaimana makna tersebut dikomunikasikan kepada audiens.

1.5.2. *State of The Art*

Penelitian sebelumnya terkait topik yang serupa berfungsi untuk menganalisis dan memperkaya penelitian yang sedang dilakukan, serta untuk membedakan antara penelitian yang sedang dilakukan

dengan penelitian yang sudah ada. Berikut ini, disertakan lima jurnal ilmiah penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan topik yang sedang diteliti, di antaranya:

1) Analisis *Framing* Pemberitaan Media *Online* Suara.com dan Beritasatu.com Atas Kasus Pernyataan Tri Rismaharini Tentang “Memindahkan Pegawai ke Papua”

Penelitian yang diambil dari **The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Sahid** ini diteliti oleh **Prisco Gusni Taregan** dan **Nurul Haniza** pada tahun **2021** mengenai bagaimana penerapan praktik *framing* oleh media *online* Suara.com dan Beritasatu.com dalam melaporkan pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait “Memindahkan pegawai ke Papua”, menurut model analisis Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Penelitian yang berangkat dari fenomena mengenai Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengungkapkan amarahnya kepada para pegawai Kementerian Sosial yang hanya bekerja enak-enakan di dalam kantor. Mensos Risma kemudian menyatakan bahwa akan mengirimkan pegawainya ke Papua jika mereka terus-terusan seperti itu. Peneliti pada akhirnya mengindikasikan adanya perbedaan wacana pada penyajian berita antar media mengenai fenomena tersebut. Dua media di antaranya, yaitu Suara.com yang di mana penyajiannya lebih ke arah yang negatif dengan respon yang

“pengecaman”. Sedangkan media lainnya, Beritasatu.com lebih menyajikan pemberitaan klarifikasi Kemensos dengan tanggapan yang “netral”.

Hasil ini dilihat menurut analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, *framing* yang digunakan media online Suara.com serta Beritasatu.com untuk melaporkan peristiwa atau pernyataan Risma mengenai “Memindahkan Pegawai ke Papua” di Balai Wyata Guna pada Selasa, (13/07/2021) memiliki perbedaan. *Framing* yang disajikan oleh Suara.com menggambarkan pernyataan Risma mengenai “Memindahkan Pegawai ke Papua” sebagai sebuah pernyataan yang kontroversial, sensitif, dan mencerminkan pandangan negatif terhadap Papua. Sementara itu, Beritasatu.com memandangnya sebagai sebuah peristiwa yang penuh motivasi (Taregan & Haniza, 2021).

2) *Framing* Media Online Detik.com Terhadap Pemberitaan Korban Pengeroyokan oleh Bobotoh

Penelitian yang diambil dari **Kajian Jurnalisme Universitas Padjadjaran** ini diteliti oleh **Muhammad Refi Sandi, Maimon Herawati, dan Justito Adiprasetyo** pada tahun **2022** mengenai bagaimana pembingkaihan peristiwa meninggalnya HS, suporter ‘The Jakmania’ di Bandung, yang dilihat dari pemilihan gambar, kata, dan juga kelengkapan unsur 5W+1H yang wartawan gunakan dalam pemberitaan tersebut. Tujuan yang

diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk memahami proses yang dilakukan wartawan untuk mengonstruksi perkembangan realitas dalam masyarakat, dengan demikian bisa menghasilkan berita yang disajikan kepada publik, yang bisa ditinjau berdasarkan struktur kalimat dan retorika yang digunakan dalam pemberitaan.

Penelitian yang berangkat dari fenomena mengenai pengeroyokan korban HS, yang merupakan salah satu suporter dari tim Persija Jakarta oleh oknum dari suporter tim Persib Bandung atau yang biasa disebut dengan ‘bobotoh’ hingga meninggal. Media yang ada Indonesia pun mulai memberitakan kasus tersebut dengan warna yang lebih intim dan menyentuh. Alasan peneliti memutuskan untuk meneliti atas fenomena tersebut adalah karena kasus bentroknya antar suporter tim sepak bola yang tidak hanya terjadi sekali atau dua kali. Peneliti pun menganggap bahwa pemberitaan mengenai kasus seperti ini penting untuk diteliti. Hal ini dikarenakan suatu media memiliki kemampuan dalam membingkai fakta berdasarkan fenomena yang terjadi.

Hasil penelitian ini ditinjau berdasarkan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang dimulai dari segi struktur sintaksis, pemingkaian oleh Detik.com bisa ditinjau melalui penyusunan fakta-fakta yang disajikan. Berdasarkan struktur skrip, maka Detik.com menonjolkan unsur-unsur dalam 5W+1H dalam cara penyajian fakta. Melihat struktur tematik,

Detik.com mengangkat tema yang berorientasi terhadap kasus kejahatan berbentuk pengeroyokan yang menimbulkan kematian suporter ‘The Jak’ oleh oknum ‘bobotoh’. Dalam struktur retorik, orientasi Detik.com terhadap fakta menggunakan gambar, kata-kata, serta grafis untuk menunjang *framing*-nya. Hal ini mengindikasikan bahwa dari enam berita yang dianalisis, empat di antaranya menekankan identitas korban, sementara dua lainnya memiliki isi yang serupa namun hanya berbeda pada judulnya (Sandi et al., 2022).

3) Analisis *Framing* Media Online Padang Ekspres Tentang Pemberitaan Mengenai Belajar Daring

Penelitian yang diambil dari **Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan** ini diteliti oleh **Rama Dhaniel** pada tahun **2021** mengenai bagaimana analisis *framing* terhadap pemberitaan media online Padang Ekspres mengenai pembelajaran daring dilakukan dengan mengkaji *framing* yang diterapkan oleh media tersebut dalam melaporkan masalah dan kebijakan terkait pembelajaran online.

Penelitian yang berangkat dari fenomena mengenai diterapkannya kebijakan pembelajaran secara daring (*online*) selama pandemi Covid-19, sehingga mengharuskan para murid beserta gurunya untuk mempunyai perlengkapan yang dapat menunjang proses pembelajaran daring tersebut, seperti *gadget*,

tablet, atau komputer hingga kualitas jaringan internet. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi beberapa orang terutama yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Peneliti kemudian mengangkat pemberitaan mengenai upaya pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan untuk mendukung siswa dan institusi pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran daring (*online*).

Hasil dari penelitian yang menggunakan model *framing* dari Robert Entman ini adalah pemberitaan media *online* Padang Ekspres menggambarkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai langkah yang cenderung tidak tegas dan terlalu hati-hati. Ini disebabkan oleh kekhawatiran pemerintah terhadap peningkatan sebaran kasus positif *corona*, terutama di kalangan klaster sekolah (Dhaniel, 2021).

4) Analisis *Framing* Media *Online* Detik.com dan Kompas.com pada Pemberitaan Aturan Pengeras Suara Masjid

Penelitian yang diambil dari **Komunikasi57: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi** ini diteliti oleh **Mikho Fridolin Siahaan** dan **Nawiroh Vera** pada tahun **2024** mengenai bagaimana pembingkaiian pemberitaan mengenai aturan pengeras suara masjid dilihat dari sudut pandang setiap media, Kompas.com serta Detik.com, menggunakan Analisis *Framing* berdasarkan model Robert N. Entman.

Penelitian yang berangkat dari fenomena mengenai timbulnya pro dan kontra atas diterbitkannya peraturan penggunaan alat pengeras suara pada tempat ibadah, terutama masjid oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Peneliti pada akhirnya mengindikasikan adanya perbedaan pada penyajian berita antar media mengenai fenomena tersebut. Dua media di antaranya, yaitu Detik.com yang di mana penyajiannya lebih meng-*highlight* pada respon dari Gus Miftah yang bertentangan dengan peraturan tersebut dan membandingkannya dengan penggunaan *speaker* untuk dangdutan hingga dini hari. Sedangkan media lainnya, Kompas.com lebih menyajikan pemberitaan mengenai uraian yang lebih jelas terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama serta sejumlah respons dari tokoh publik, seperti Buya Syafii yang berpendapat bahwa para pejabat publik perlu menumbuhkan budaya yang bijaksana agar di masa mendatang tidak memicu kontroversi di tengah masyarakat.

Hasil dari penelitian yang menggunakan model *framing* dari Robert Entman ini adalah pembingkaihan berita antara keduanya memiliki kesamaan, dimana fokus pada terbentuknya kenyamanan serta keharmonisan dalam masyarakat di tengah perbedaan latar belakang dan keyakinan. Dua, media juga menyoroti sosok Gus Miftah, tokoh agama, yang memprotes surat edaran dari Kementerian Agama. Keduanya memberitakan hal yang serupa,

yakni bahwa Gus Miftah dianggap tidak paham mengenai surat edaran dari Kementerian Agama (Siahaan & Vera, 2024).

5) Analisis *Framing* Pemberitaan Media *Online* Detik.com dan Tribunnews.com Kasus Pelecehan Seksual di Universitas Andalas

Penelitian yang diambil dari **Jurnal Educatio Universitas Majalengka** ini diteliti oleh **Rizkia Putri** dan **Hendra Setiawan** pada tahun **2023** mengenai bagaimana cara media Tribunnews.com dan Detik.com mengonstruksi atau membingkai peristiwa terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Dosen Universitas Andalas, hal ini dianalisis dengan berdasar pada teori analisis *framing* metode Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Penelitian yang berangkat dari fenomena mengenai adanya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Andalas oleh seorang oknum dosen dari universitas tersebut menarik perhatian peneliti untuk melakukan analisis *framing*. Peneliti menyatakan bahwa kasus pelecehan seksual merupakan kasus yang kerap terjadi di mana saja dan kapan saja. Tidak dapat dipungkiri jika terdapat perbedaan pada penyajian berita antar media mengenai fenomena tersebut. Dua media di antaranya, yaitu Detik.com dan Tribunnews.com. Kedua media *online* ini digunakan oleh peneliti dalam menganalisis pembingkaiian pemberitaan terkait fenomena

yang sudah disebutkan dengan alasan karena kepopulerannya kedua media *online* tersebut di Indonesia.

Hasil dari penelitian yang menggunakan metode *framing* oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki ini adalah masing-masing media mempunyai karakteristik khasnya tersendiri dalam menulis beritanya. Misalnya, media Tribunnews.com dan Detik.com berbeda dalam cara membingkai penulisan berita terkait kekerasan seksual. Meskipun demikian, keduanya dalam memberitakan kasus pelecehan seksual oleh oknum Dosen Universitas Andalas memakai teknik piramida terbalik, di mana bagian awal adalah topik utama berita (Putri & Setiawan, 2023).

Persamaan yang didapat dari lima penelitian sebelumnya dan penelitian ini ada pada teori, paradigma penelitian (paradigma konstruktivisme), pendekatan (kualitatif), tipe penelitian (deskriptif), jenis data (teks atau kata-kata), teknik pengumpulan data (observasi dan dokumentasi), dan metode analisis data (model Robert Entman) di 2 dari 5 penelitian sebelumnya. Sedangkan, perbedaan yang didapat dari lima penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni ada pada topik dan media *online* yang digunakan dalam penelitian. Kemudian, adanya perbedaan metode analisis data (metode Zhongdang Pan dan Gerald Kosicki) pada 3 dari 5 penelitian sebelumnya.

1.5.3. *Agenda Setting Theory*

Teori *Agenda Setting* menyatakan bahwa media massa sangat berpotensi dalam menentukan isu-isu penting kepada publik (Littlejohn et al., 2016). Media tidak secara eksplisit memberi tahu audiens apa yang harus mereka pikirkan, melainkan mengarahkan perhatian mereka pada isu-isu tertentu yang dianggap penting. Dalam konteks ini, media menjalankan fungsi sebagai penentu agenda dengan cara memilih, menonjolkan, dan memusatkan pemberitaan pada isu-isu spesifik, sehingga audiens pun melihat isu tersebut sebagai sesuatu yang layak diperhatikan. Tahap ini dikenal sebagai *agenda media*, di mana keputusan redaksional dan kepentingan informasi turut memengaruhi isu mana yang akan diangkat. Ketika masyarakat mulai memperhatikan isu yang dibentuk oleh media, maka terbentuklah *agenda publik*. Selanjutnya, perhatian publik yang meluas dapat memengaruhi *agenda kebijakan*, karena pihak pembuat keputusan akan menanggapi tekanan dan perhatian publik terhadap isu tersebut.

Proses terbentuknya agenda ini berlangsung melalui beberapa langkah, mulai dari pemilihan isu oleh media, penonjolan isu melalui intensitas dan gaya penyampaian berita, penyebaran informasi kepada publik, hingga akhirnya masyarakat membentuk opini atau sikap terhadap isu tersebut. Opini publik yang terbentuk ini kemudian bisa mendorong para pengambil kebijakan untuk merespons dengan tindakan atau regulasi tertentu. Dengan demikian, terdapat hubungan

timbang balik antara media, publik, dan pembuat kebijakan dalam pembentukan prioritas isu. Teori ini menunjukkan besarnya tanggung jawab media dalam menentukan apa yang perlu mendapat sorotan publik. Dalam konteks Indonesia, konsep *agenda setting* tampak nyata ketika media secara masif memberitakan isu-isu seperti bencana alam, kasus korupsi, atau peristiwa politik, yang kemudian memicu perhatian masyarakat luas dan bahkan memengaruhi keputusan politik atau kebijakan pemerintah. Maka, jelas bahwa media bukan sekadar penyampai informasi, melainkan aktor utama dalam proses pembentukan opini publik dan arah kebijakan.

Dalam buku *Theories of Human Communication* (2016) oleh Stephen W. Littlejohn, konsep *framing* dijelaskan sebagai bagian integral dari *second-level agenda setting theory*. Pada tingkat ini, media tidak sekadar menentukan isu mana yang harus menjadi fokus perhatian publik, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu tersebut. Fokus teori ini bukan lagi hanya pada pentingnya isu, melainkan pada bagaimana media menggarisbawahi atribut atau karakteristik tertentu dari isu yang diberitakan. *Framing* berkaitan dengan cara media memilih kata-kata, menyusun narasi, dan menentukan sudut pandang dalam menyampaikan suatu peristiwa atau tokoh. Melalui pembedaan ini, media menyusun realitas dengan cara tertentu yang memengaruhi bagaimana audiens memahami dan menilai informasi. Dalam perspektif Littlejohn (2016), *framing* dalam

second-level agenda setting memperlihatkan bahwa media tidak hanya menetapkan topik yang penting untuk dibicarakan, tetapi juga membentuk pola pikir masyarakat terhadap topik tersebut.

Framing berasal dari pemikiran Erving Goffman. Goffman sendiri adalah sosiolog terkenal yang mengemukakan konsep *framing* dalam karyanya dengan judul “*The Presentation of Self in Everyday Life*” (1959). Menurut Goffman, *framing* didefinisikan sebagai skema interpretasi yang memberikan kemungkinan bagi seseorang menyusun, melihat, mengenali, serta memberikan label pada berbagai peristiwa atau pengalaman hidup (Santi, 2012). *Framing* memiliki dampak yang besar sehingga *framing* termasuk ke dalam topik yang perlu diperhatikan.

Framing sendiri merupakan proses pemilihan dan penekanan pada aspek-aspek tertentu dari realitas yang ada untuk membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi, dengan tujuan untuk memajukan suatu definisi masalah, interpretasi penyebab, penilaian moral, dan/atau saran solusi terhadap isu yang dibahas (Entman, 1993). Sederhananya, analisis *framing* dapat diartikan sebagai kajian dalam memahami cara suatu media membingkai realitas, misalnya kelompok, individu, peristiwa, atau yang lainnya. Pembingkaiannya tersebut melalui proses konstruksi, dimana realitas sosial dibentuk dan dimaknai dengan cara tertentu (Eriyanto, 2012).

1.5.4. Teori Konstruksi Sosial (*Social Construction Theory*)

Konstruksi sosial adalah teori sosiologi modern dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Realitas sosial dalam paradigma konstruktivis, dianggap hasil konstruksi yang dibuat individu. Individu adalah makhluk bebas yang terlibat dalam interaksi dengan sesama manusia. Mereka berperan sebagai pengarah dalam membentuk dunia sosial, yang dibangun menurut kehendak mereka. Individu bukan merupakan pihak yang terhimpit oleh fakta sosial, melainkan sebagai agen yang secara kreatif memproduksi dan mereproduksi dunia sosialnya (Demartoto, 2013).

Teori konstruksi sosial menjelaskan bahwa manusia yang berada dalam suatu konteks sosial berinteraksi dengan lingkungan mereka secara bersamaan. Masyarakat hidup dalam realitas dan juga dimensi objektif yang dibentuk lewat proses objektivasi, eksternalisasi, dan dimensi subjektif dibentuk lewat internalisasi. Proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi ini selalu berlangsung secara dialektik dalam masyarakat. Oleh karena itu, realitas sosial yaitu hasil konstruksi sosial yang dibentuk manusia itu sendiri (Zainuddin, 2013).

Realitas sosial dibentuk melalui proses interaksi manusia dan tidak bersifat objektif atau tetap (Berger & Luckmann, 1991). Menurut Berger & Luckmann, dunia sosial bukanlah sesuatu yang sudah ada begitu saja, melainkan diciptakan dan dipertahankan melalui hubungan sosial dan bahasa dalam kehidupan sehari-hari.

Mereka mengidentifikasi tiga tahap utama dalam konstruksi sosial: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

- **Eksternalisasi**

Tahap ini, individu mengekspresikan pengalaman subjektif mereka ke dalam dunia sosial melalui tindakan, bahasa, dan interaksi. Artinya, manusia "mengeluarkan" makna-makna dari dalam dirinya dan menuangkannya ke dunia luar.

- **Objektivasi**

Tahap selanjutnya, hasil dari eksternalisasi tadi kemudian menjadi bagian dari realitas yang tampak objektif dan terlepas dari individu. Misalnya, aturan atau institusi sosial seperti sekolah, keluarga, atau hukum, yang awalnya dibentuk oleh manusia, lama-kelamaan dianggap sebagai sesuatu yang "selalu ada" dan bersifat wajar.

- **Internalisasi**

Tahap terakhir, individu menyerap kembali realitas sosial tersebut melalui proses sosialisasi, sehingga realitas itu terasa nyata dan membentuk kesadaran serta identitas individu. Dalam tahap ini, seseorang menerima struktur sosial yang ada sebagai sesuatu yang alamiah dan masuk akal.

Dengan demikian, menurut Berger dan Luckmann, realitas sosial adalah hasil dari konstruksi yang berulang-ulang melalui interaksi sosial, dan bukan sesuatu yang objektif atau universal.

Realitas dipelajari, disepakati bersama, diwariskan, dan diteruskan dari generasi ke generasi. Teori ini menekankan bahwa apa yang kita anggap "nyata" dalam kehidupan sosial sebenarnya adalah hasil dari proses sosial yang terus-menerus dibentuk dan dinegosiasikan oleh manusia.

Manusia atau individu dalam konteks penelitian ini yaitu media massa sebagai aktor sosial, bisa saja mengonstruksi suatu realitas dengan pemaknaan yang berbeda satu sama lain berdasarkan kepentingannya masing-masing. Pemberitaan yang disajikan pada media massa tidak dapat dipadankan dengan realitas yang ada, melainkan dilihat sebagai produk dari realitas yang telah dikonstruksi. Maka dari itu, setiap media massa bisa saja mengonstruksi suatu realitas yang sama dengan cara yang berbeda (Rifa'i, 2024).

1.5.5. *Public Journalism*

Public journalism atau jurnalisme publik, menurut Jay Rosen (1999), merupakan pendekatan jurnalistik yang menekankan peran aktif media dalam membangun ruang publik yang deliberatif dan partisipatif. Jay Rosen, salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori ini, menyatakan bahwa jurnalisme publik berupaya menempatkan jurnalis di sisi warga negara, bukan di sisi elit politik atau institusi kekuasaan. Dalam pandangannya, media memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memfasilitasi percakapan publik yang konstruktif, memperkuat

partisipasi warga dalam demokrasi, dan membantu masyarakat memahami serta memecahkan masalah sosial yang mereka hadapi (Adi, 2016).

Rosen (1999) menjelaskan bahwa jurnalisme publik lahir dari keprihatinan terhadap rendahnya tingkat partisipasi politik warga, meningkatnya apatisme publik terhadap isu-isu sosial, serta krisis kepercayaan terhadap media arus utama. Ia melihat bahwa jurnalisme tradisional cenderung bersifat top-down dan terlalu terfokus pada elite sebagai sumber utama informasi. Sebaliknya, *public journalism* mengusulkan pendekatan yang lebih dialogis dan partisipatoris, dengan memberi ruang bagi warga untuk menyuarakan pandangan mereka serta berperan dalam menentukan agenda liputan media.

Teori *public journalism* ini selaras dengan teori komunikasi partisipatoris dan demokrasi deliberatif yang menempatkan komunikasi sebagai proses interaktif antara warga dan institusi publik (McQuail, 2010). Selain itu, teori ini juga bersinggungan dengan konsep *agenda setting* tingkat kedua, yakni kemampuan media untuk memengaruhi cara pandang publik terhadap isu, bukan hanya isu apa yang penting tetapi bagaimana isu tersebut dibingkai (McCombs & Shaw, 1972). Namun demikian, *public journalism* juga menuai kritik, terutama karena dianggap dapat mengaburkan prinsip objektivitas jurnalistik dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan ketika media terlalu terlibat dalam komunitas (Glasser, 1999).

Dengan demikian, teori *public journalism* menurut Jay Rosen memberikan kontribusi penting dalam memikirkan kembali peran media dalam demokrasi. Jurnalisme tidak hanya sebagai penyalur informasi, tetapi juga sebagai institusi sipil yang berperan aktif dalam membentuk warga negara yang partisipatif dan kritis.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. *Framing* Media

Framing media merupakan cara media dalam memilih serta menekankan terhadap suatu aspek dari isu atau peristiwa tertentu untuk membentuk interpretasi audiens. *Framing* ini mencakup pemilihan teks atau kata-kata dan struktur penyajian berita yang memberikan makna tertentu terhadap fenomena yang dilaporkan. *Framing* media dalam penelitian ini merujuk pada cara media *online* RRI.co.id membingkai isu mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran pemerintah dalam pemberitaan.

Framing media dalam penelitian ini diukur berdasarkan beberapa aspek, di antaranya:

- **Teks atau Kata-Kata**

Teks atau kata-kata berupa istilah atau frasa yang digunakan dalam judul dan isi berita untuk menggambarkan efisiensi anggaran di setiap artikel.

- **Struktur Penyajian Berita**

Urutan informasi dalam artikel, seperti apakah fokus pertama pada manfaat dari Kebijakan Efisiensi Anggaran atau potensi risiko atau bahkan pemborosan.

1.6.2. Media *Online* RRI.co.id

Media *online* RRI.co.id merupakan salah satu *platform* berita digital yang masih termasuk ke dalam bagian dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, yang menyajikan berbagai isu nasional, termasuk salah satunya kebijakan pemerintah, ekonomi, serta sosial untuk menginformasikan pada khalayak luas. Dalam penelitian ini, media *online* RRI.co.id merupakan sumber pemberitaan yang digunakan untuk menganalisis *framing* mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran.

Media *online* RRI.co.id dalam penelitian ini diukur berdasarkan beberapa aspek, di antaranya:

- **Frekuensi Pemberitaan**

Jumlah artikel yang diterbitkan oleh RRI.co.id terkait dengan Kebijakan Efisiensi Anggaran dalam periode waktu sejak diterbitkannya Kebijakan Efisiensi Anggaran, yakni pada tanggal 22 Januari 2025 hingga akhir bulan Februari 2025.

- **Rubrik Berita**

Artikel yang dianalisis termasuk ke dalam rubrik apa saja, seperti berita utama, opini, atau laporan khusus mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran.

1.6.3. Kebijakan Efisiensi Anggaran

Kebijakan Efisiensi Anggaran menjadi salah satu langkah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara atau daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengeluaran publik. Kebijakan Efisiensi Anggaran dalam penelitian ini merujuk pada kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan anggaran untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi.

Kebijakan Efisiensi Anggaran dalam penelitian ini diukur berdasarkan beberapa aspek, di antaranya:

- **Isi Kebijakan yang Diangkat**

Artikel-artikel yang mengangkat kebijakan-kebijakan tertentu yang terkait dengan efisiensi anggaran, seperti pengurangan anggaran untuk program tertentu, penataan ulang anggaran, atau prioritas anggaran baru.

- **Analisis Kebijakan dalam Berita**

Bagaimana kebijakan ini dijelaskan dan diposisikan dalam artikel, apakah difokuskan pada manfaat, tantangan, atau kritik terhadap kebijakan tersebut.

1.7. Asumsi Penelitian

Asumsi merupakan suatu landasan yang mendasari sebuah penelitian. Asumsi sangat penting untuk ditetapkan supaya penelitian yang dilakukan tidak melampaui sistem batasan yang ada. Dengan kata lain, asumsi

digunakan sebagai titik tolak dalam penelitian yang kebenarannya dapat diterima oleh penyelidik (Arikunto, 2010).

Berdasarkan pemahaman teoritis dan praktis atas permasalahan yang diteliti, maka dapat diasumsikan bahwa *framing* yang diterapkan oleh media *online* seperti RRI.co.id merupakan hasil dari proses konstruksi sosial, yang dipengaruhi oleh nilai, ideologi, dan interpretasi redaksional. Media tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga mengarahkan bagaimana isu tersebut harus dipahami oleh audiens.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran, deskripsi, atau representasi atas suatu fenomena atau subjek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta, karakteristik, serta hubungan antar fenomena yang sedang diteliti (Rukajat, 2018).

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian pada penelitian ini yakni dengan melakukan pengamatan dan menganalisis pada artikel pemberitaan yang diunggah pada media *online* RRI.co.id mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini yaitu pemberitaan Kebijakan Efisiensi Anggaran pada media *online* RRI.co.id dalam periode waktu sejak diterbitkannya Kebijakan Efisiensi Anggaran, yakni pada tanggal 22 Januari 2025 hingga akhir bulan Februari 2025. Pada periode waktu tersebut terdapat sebanyak kurang lebih 8 artikel untuk diteliti.

1.8.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data berupa teks atau kata-kata mengenai pemberitaan Kebijakan Efisiensi Anggaran yang diunggah pada media *online* RRI.co.id.

1.8.5. Sumber Data

1.8.5.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama atau subjek yang diteliti. Data primer pada penelitian ini didapat dari pemberitaan mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran yang diunggah pada media *online* RRI.co.id.

1.8.5.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber lainnya yang digunakan sebagai data pendukung serta pelengkap dari penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini didapat dari buku, jurnal atau artikel ilmiah, media sosial, dan dokumen lainnya yang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan observasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berita-berita terkait Kebijakan Efisiensi Anggaran yang dimuat oleh media *online* RRI.co.id, dengan cara memasukkan kata kunci (*keyword*) ‘efisiensi anggaran’ pada kolom pencarian (*search bar*). Sedangkan, teknik observasi dilakukan untuk memahami bagaimana media *online* RRI.co.id menyajikan pemberitaan mengenai Kebijakan Efisiensi Anggaran.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Model *framing* yang dikembangkan oleh Robert Entman (1993) menyoroti bagaimana media memilih dan menonjolkan elemen-elemen informasi tertentu dalam pemberitaan untuk disampaikan kepada audiens mengenai isu atau peristiwa. Dengan mendefinisikan masalah, memperkirakan sumber masalah, membuat penilaian moral, serta menekankan penyelesaian, media membingkai pesan dengan menonjolkan beberapa aspek dan juga mengabaikan aspek-aspek lainnya. Model ini dapat membantu untuk memahami bagaimana *framing* yang dilakukan oleh media dalam menyajikan informasi mengenai kebijakan, peristiwa sosial, atau isu-isu tertentu.

Model *framing* oleh Robert Entman digunakan pada penelitian ini dikarenakan pendekatan ini secara khusus dirancang untuk mengungkap bagaimana media membingkai suatu isu, baik dari segi

isi maupun cara penyajiannya. Dalam konteks Kebijakan Efisiensi Anggaran, isu tersebut tentu memiliki banyak dimensi, seperti misalnya pendidikan, ekonomi, politik, sosial, bahkan birokrasi. Model Entman ini memungkinkan peneliti mengurai bagaimana media *online* seperti RRI.co.id menonjolkan aspek tertentu dari kebijakan tersebut, dan mengabaikan aspek lainnya.

Entman mengidentifikasi proses *framing* melalui 4 tahapan, yakni sebagai berikut:

<i>Define Problem</i> (Mendefinisikan Masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Sumber Masalah)	Peristiwa ini disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab masalah tersebut?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Nilai moral apa yang disajikan? Nilai moral apa yang dipakai untuk menjelaskan masalah?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah?

Tabel 1 Model Framing Robert Entman (1993)

1.8.8. Kualitas Data (Goodness Criteria)

Kualitas data penelitian kualitatif dalam paradigma konstruktivisme diperoleh melalui analisis kredibilitas dan otentisitas dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial.

Credibility, yakni hasil penelitian masuk akal dan dapat dipercaya. Terdapat keselarasan antara teori, pertanyaan penelitian, pengumpulan data, analisis, dan hasil. Strategi pengambilan sampel, kedalaman dan volume data, serta langkah-langkah analisis yang diambil, diharapkan sesuai dengan kerangka yang ada.

Authenticity, yakni hasil penelitian mencerminkan kenyataan, pengalaman, atau perspektif yang asli dan asli dari subjek atau fenomena yang sedang dipelajari. Dalam konteks penelitian kualitatif, hal ini berhubungan dengan memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan menggambarkan secara akurat dan jujur terhadap pengalaman atau pandangan subjek penelitian.